



PEMERINTAH
KABUPATEN
KAPUAS HULU

KAPUAS HULU!
SEMAKIN HEBAT!



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

... _____

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kami telah dapat menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2025-2029.

Adapun Renstra OPD ini akan diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Materi Renstra ini mengandung Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berdasarkan kondisi masa kini dan kondisi yang diinginkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Keterbatasan data pendukung merupakan hambatan utama dalam menyusun Renstra khususnya dalam menentukan prioritas kegiatan, namun demikian dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bertekad untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dituangkan ini.

Kami sangat berharap Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat mendukung kegiatan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Saran masukan dan kritik yang bersifat membangun dari para stakeholder sangatlah kami harapkan guna kesempurnaan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

Putussibau, 31 Oktober 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu




MARTHA BANANG, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP: 19651123 199203 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	13
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	21
2.2 Permasalahan dan Isu strategis.....	21
2.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kapuas Hulu.....	24
2.2.2 Telaahan Renstra K/L Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	26
2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	26

2.2.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	29
2.2.5	Penentuan Isu Strategis.....	33
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
3.1	Tujuan Renstra 2025-2029.....	38
3.2	Sasaran Renstra 2025-2029.....	43
3.3	Strategi Renstra 2025-2029.....	47
3.4	Arah Kebijakan Renstra 2025-2029.....	47
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54
4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	54
4.2	Uraian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	80
4.3	Uraian Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	85
4.4	Uraian Subkegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu..	92
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	103
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	108
BAB V	PENUTUP.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	15
Tabel 2.2	Capaian kinerja berdasarkan Sasaran/ Target Renstra Tahun 2021-2026.....	18
Tabel 2.3	Kerangka Kerja Analisis SWOT Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	30
Tabel 2.4	Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	35
Tabel 3.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan RENSTRA Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3.2	Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	42
Tabel 3.3	Sasaran, Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	43
Tabel 3.4	Target Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu...	45
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Renstra Tahun 2025-2029 Pada Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	49
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	55
Tabel 4.2	Program pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	81
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra.....	94
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2025-2030 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	104
Tabel 4.6	Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU).....	106
Tabel 4.7	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	9
Gambar 2.2	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	15
Gambar 2.3	Persentase Menurut Golongan/ruang.....	16
Gambar 2.4	Persentase Menurut Pendidikan Terakhir.....	16
Gambar 2.5	Persentase Menurut Jenis Kelamin.....	16
Gambar 2.6	Jumlah Mitra Urusan Sosial.....	16
Gambar 3.1	Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu).....	38
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	39
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kekuasaan Pemerintah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan dibedakan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran Pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pengampu 2 (dua) Urusan Pemerintahan wajib yaitu di bidang Sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu diperlukan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Penyusunan Renstra dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu dalam penyusunan Renstra juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029 dalam rangka menyelaraskan arah dan kebijakan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada dokumen perencanaan daerah tersebut.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos yang kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga seluruh aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029

merupakan proyeksi masa yang akan datang dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan sudah tergambar dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas. Dokumen ini juga sebagai pedoman dalam merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan urusan bidang Dinas Sosial maupun bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan dari RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dengan berpedoman pada RPJM 2025-2029;
2. Merumuskan Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2025-2029;
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistemati kepenulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 , sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini Menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum penyusunan, Maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini menjelaskan Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kelompok Sasaran Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengidentifikasi Permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan laporan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD 2025-2029 ataupun penjangkaran hasil aspirasi yang dilakukan. Rumusan masalah merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Kemudian mengidentifikasi Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional).

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra serta penentuan Strategi dan Arah Kebijakan dari Renstra 2025-2029 yang berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD.

BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahiran dalam rangka untuk mencapai Kinerja Perangkat Daerah 2025-2029.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan Penyelarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 serta Kinerja Renstra Perangkat Daerah Per urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, maka dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah ” ***Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah***”. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas dapat dilihat Susunan Organisasi sebagai berikut ini :

Gambar 2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Dari Gambar diatas Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur.
3. Kepala Bidang Sosial;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a) Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi:

- a) Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b) Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja Dinas;
- c) Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas;
- d) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Tata Laksana Dinas;
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Dinas;
- g) Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat;
- h) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Subbagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan asset milik dinas.

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
- d) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e) Pengelolaan barang milik Dinas;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Bidang Sosial

Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bidang Sosial terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Fungsi

- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Sosial;
- b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Sosial;
- c) Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- d) Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
- e) Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- f) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
- g) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan Pengemis yang di luar Panti Sosial;
- h) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza diluar Panti lainnya;
- i) Pemeliharaan Anak-anak terlantar;

- j) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah;
- k) Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Sosial secara periodik; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Fungsi

- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah;
- d) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Daerah;
- e) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Daerah;
- f) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
- g) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Daerah;
- h) Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah;
- i) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah;
- j) penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
- k) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
- l) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah;

- m) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah;
- n) penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah;
- o) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah;
- p) penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah;
- q) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
- r) Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik; dan
- s) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada di dalam lingkup kerja.

6). Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Barang/alat merupakan barang inventaris kantor adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan Bangunan

Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menempati gedung yang terletak di kom yos sudarso Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Sarana Mobilitas

Adalah kendaraan dinas jabatan dan operasional baik roda empat maupun roda dua yang menjadi inventaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tercatat sebagai berikut ini :

- 1) Kendaraan Dinas operasional/ jabatan roda empat : 2 unit;
- 2) Kendaraan Dinas operasional roda dua : 14 unit

c. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan perlengkapan dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung operasional dinas baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan pelayanan dan kegiatan lainnya yang terdiri dari:

1) Peralatan Elektronik

- a) PC : 9 unit
- b) Laptop : 19 unit
- c) Printer : 13 unit
- d) TV LED : 1 unit
- e) *Air Conditioner* : 11 unit

2) Perlengkapan Kerja dan Perlengkapan Kantor

- a) Meja Kerja : 19 buah
- b) Kursi tamu : 1 set
- c) Filing cabinet : 5 unit

- d) Lemari Kaca : 1 unit
- e) Lemari kayu : 1 unit
- f) Lemari Arsip : 1 unit

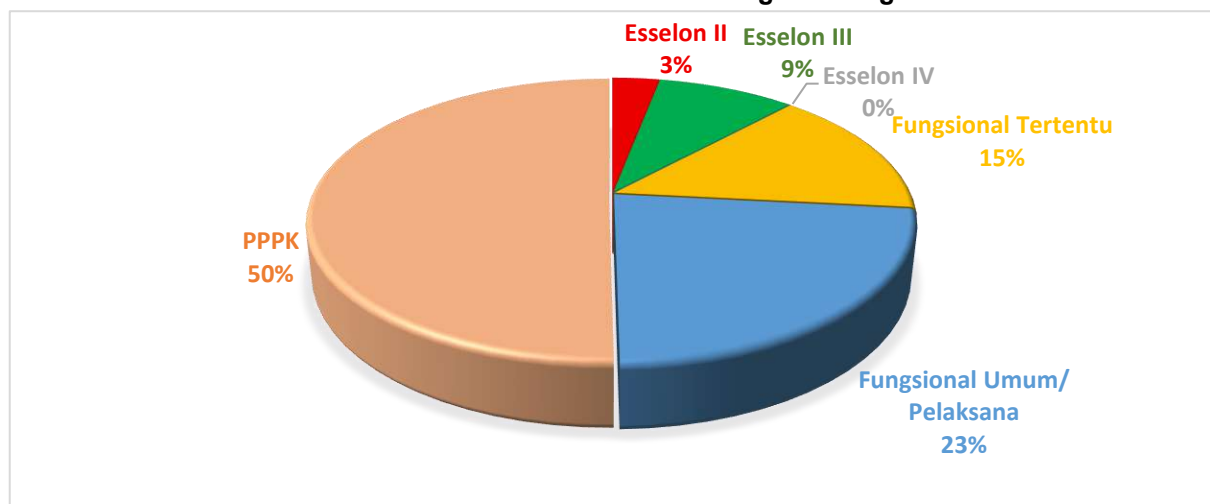
2. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Aparatur (SDA) sampai dengan Bulan Oktober 2025 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dari ASN terdiri dari PNS berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Adapun Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

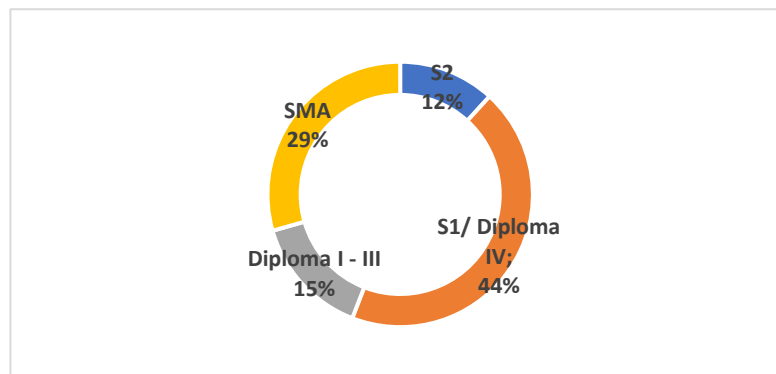
Tabel 2.1
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

No	Eselon/Non eselon	Pendidikan Terakhir				Jumlah	Golongan/Ruang								Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		S2	S1/DIV	DI-III	SMA		II	III	IV	V	VI	VII	IX	Laki-laki		Perempuan		
1	Eselon II	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
2	Eselon III	1	2	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3	2	1	3	
3	Eselon IV	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
4	Jabatan Fungsional Tertentu	1	3	1	-	5	-	5	-	-	-	-	-	5	3	2	5	
5	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	1	6	-	1	8	-	8	-	-	-	-	-	8	1	7	8	
6	PPPK	-	4	4	9	17	-	-	-	9	-	4	4	17	9	8	17	
Jumlah		4	15	5	10	34	0	16	1	9	0	4	4	34	15	19	34	

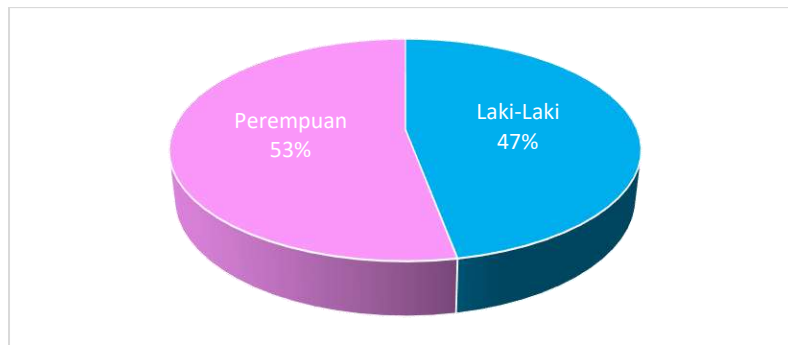
Gambar 2.3
Persentase Menurut Golongan/Ruang



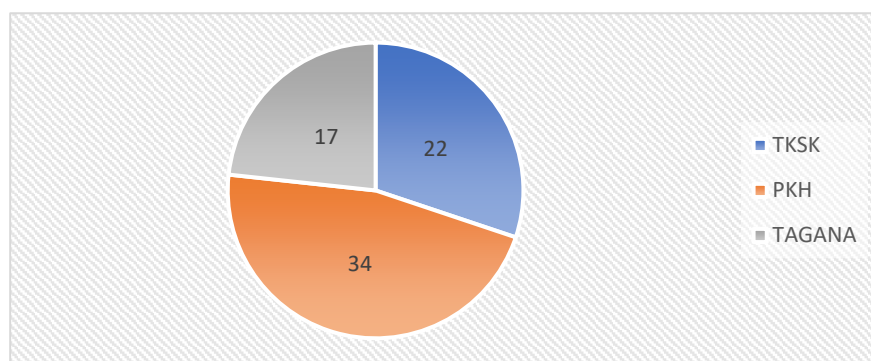
Gambar 2.4
Persentase Menurut Pendidikan Terakhir



Gambar 2.5
Persentase Menurut Jenis Kelamin



Gambar 2.6
Jumlah Tenaga Mitra Urusan Sosial



Dari Tabel 2.1 Selain SDM tersebut terdapat juga mitra Urusan di bidang Sosial yaitu Tenaga Teknis Lapangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 73 orang yang tersebar pada 23 Kecamatan yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 22 orang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 34 orang dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 17 orang.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tugas dan fungsi merupakan pengampu 2 (dua) urusan yang K/L yang berbeda. Urusan Pemerintahan wajib yaitu di bidang Sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Capaian Kinerja Layanan Umum urusan Sosial diukur dengan indikator Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Layanan Umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak;

C. Non Urusan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Non urusan meliputi berbagai kegiatan yang mendukung operasional dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dengan indikator Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Adapun gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 5 tahun kebelakang (Renstra Tahun 2021-2026) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian kinerja berdasarkan Sasaran/ Target Renstra Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Kunci/ IKK	Indikator Lainnya	Target RENSTRA					Realisasi					Ket
	Sasaran OPD	Program	Sasaran Program			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial		80%	80%	85%	85%	85%	78,88%	68.69%	78.94%	85,43%		
		Pemberdayaan Sosial	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang di Fasilitas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%		
		Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan	Meningkakan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan		100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0%	100%		
		Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Pelayanan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,24%	99,96%		
		Penanganan Bencana	Meningkatkan pelayanan kepada Korban bencana alam/ sosial	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang dapat diberikan Pelayanan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%		
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatkan efektifitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak			Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan		70%	72%	74%	76%	78%		70,59%	41,18%	47,06%		
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		2,51	2,51	2,51	2,51%				2,21%	2,30%		
		Perlindungan Perempuan	Meningkatkan pelayanan kepada Perempuan korban kekerasan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani		100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	80%		

		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Nilai Nilai KLA	capaian Kabupaten Layak Anak		150	150	200	300	400	0	0	162	709		
		Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya anak korban kekerasan yang tertangani	Persentase Kasus Anak Korban Kekerasan yang tertangani		13%	14%	15%	16%	-	-	-	-	50%		
3	Meningkatnya Implemntasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Predikat Sakip		CC	B	B	BB	BB	CC	B	B	BB		
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai Sakip		50-60	60-70	60-70	70-80	70-80	55,19	61,40	61,40	73,25		

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Kelompok sasaran Pelayanan adalah pihak yang menjadi fokus utama penerima manfaat dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Anak terlantar, Lansia, Penyandang disabilitas, Tuna susila, Gelandangan dan Pengemis, Pemulung, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Tindak kekerasan (Fisik, Psikologis, atau Seksual), Korban Bencana Alam/Sosial, Fakir Miskin, Pekerja Migran, ODHA, Komunitas Adat Terpencil.;
3. Anak yang berusia 0 s/d <18 tahun dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, Anak yang berhadapan Hukum (ABH), dan anak Korban Tindak kasus kekerasan dan Memerlukan Perlindungan Khusus pada Anak (seperti korban perdagangan, kekerasan, eksploitasi);
4. Perempuan usia produktif, Perempuan kelompok minoritas dan Perempuan Korban tindak kekerasan.

2.2 Permasalahan dan Isu strategis

2.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kapuas Hulu

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil identifikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi

perumusan isu - isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu - isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, Tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor - faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang terpilih pada periode 2025-2029 yaitu Terwujudnya Kapuas Hulu “**SEMAKIN HEBAT**” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil). Penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dijelaskan sebagai berikut.

1. **Harmonis**, Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta tercipta kehidupan yang harmonis antar umat beragama.
2. **Energik** dan **Berdaya Saing**, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki daya saing baik dari pengembangan Sumber Daya Manusianya maupun dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil dan handal.
3. **Amanah**, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berorientasi pelayanan serta bebas korupsi.
4. **Terampil**, Terciptanya angkatan kerja yang terampil sehingga tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang.

Dari Visi diatas tentunya didukung Misi sebagai langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi tersebut sebagai berikut:

MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan, mendorong

terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan harmonis antar umat beragama dengan tetap melestarikan kebudayaan lokal.

MISI 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah berbasis hilirisasi dan peningkatan investasi daerah dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

MISI 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar khususnya di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas, misi ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil.

MISI 5: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, Meningkatkan kapasitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang berkualitas disertai dengan penyediaan sarana prasarana kepelatihan.

Dari 5 (lima) misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada misi yaitu :

MISI 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan

MISI 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas Pendidikan

MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas

2.2.2 Telaahan Renstra K/L Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing:

1. Visi dan Misi Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial yaitu *“Menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan”*.

Misi Kementerian Sosial

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Sosial memiliki empat misi strategis:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan sosial.
2. Meningkatkan peran serta dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
3. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
4. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih.

2. Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu *“Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”*.

Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki enam misi strategis :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender
3. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan
4. Penegakan hak asasi manusia bagi perempuan
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
6. Kemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak

3. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat *“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan”*

Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota;
3. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Barat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip Good Governance dan Good Government;
5. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
6. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal;
7. Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera;
8. Memberikan kepastian hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM) serta keadilan dan kesejahteraan gender;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
10. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
11. Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada periode pembangunan 2014-2034 sebagai arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah di daerah. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri adalah untuk “Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”. Hal ini tentu sudah menjadi tujuan utama mengingat Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan memiliki potensi alam yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Selain berfokus pada peningkatan nilai ekonomi, hal ini juga tercermin dalam pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata. Dengan demikian, rencana ini tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan berbagai sektor yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merujuk pada serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman utama dalam penggunaan ruang darat, laut, dan udara, termasuk juga ruang bawah tanah, guna mencapai tujuan penataan ruang tersebut. Selain sektor-sektor tersebut, pembangunan spasial di Kabupaten Kapuas Hulu juga berlandaskan atas asas kesejahteraan Masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan penataan tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat aturan kebijakan yang perlu diketahui dalam menetapkan batas-batas ataupun pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang dalam mendukung tujuan diatas tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 mengenai RTRW Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

1. Pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan ekowisata;
3. Pengembangan agropolitan;

4. Pengembangan energi dan sumber daya mineral;
5. Pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
6. Pengembangan kawasan perbatasan;
7. Pengembangan infrastruktur;
8. Penanganan kawasan rawan bencana; dan
9. Peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara.

Kebijakan tersebut membawa pada perencanaan struktur ruang wilayah daerah, khususnya pusat kegiatan dimana terdapat lima pusat kegiatan yakni:

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni Kota Badau
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kota Putussibau
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni Kota Nanga Tepuai dan Semitau
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas:
 - kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
 - kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
 - kawasan perkotaan Jongkong di Kecamatan Jongkong;
 - kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah;
 - kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:
 - Desa Bika di Kecamatan Bika;
 - Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;
 - Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;
 - Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;
 - Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
 - Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;
 - Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
 - Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;
 - Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;
 - Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;
 - Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;
 - Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;
 - Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;
 - Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;
 - Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu; dan
 - Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap rencana, program, atau kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.

Di bidang Sosial, KLHS bertujuan untuk mengkaji dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan Tata kelola serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang belum memadai maupun Program Pengentasan kemiskinan berbasis kultural, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur. Dari isu strategis maka ditetapkan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) Tanpa Kemiskinan yang direncanakan, serta memastikan bahwa Upaya pemetaan prioritas berjalan dengan prinsip keberlanjutan.

Di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KLHS bertujuan Memastikan kebijakan dan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari isu strategis Tata kelola serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang belum memadai maka perlu dari kebijakan Akselerasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlandaskan kesetaraan gender dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun mendatang.

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Agar strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tergambar dalam analisis SWOT. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. *Strength Factors* (Kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

2. *Weakness Factors* (Kelemahan)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

3. *Opportunities Factors* (Peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal/internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, kebijakan pemerintah kondisi lingkungan sekitar.

4. *Threats Factors* (Ancaman)

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dari uraian diatas, dilakukan identifikasi faktor-faktor dampak Internal maupun Eksternal melalui Analisa SWOT Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Kerangka Kerja Analisis SWOT Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

<i>Strength Factors</i> (Kekuatan)	<i>Weakness Factors</i> (Kelemahan)
Adanya peningkatan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkelanjutan.	Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan yang cukup tinggi baik pada urusan Sosial maupun urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Adanya peningkatan komitmen pelayanan publik.	Pola pikir dan budaya kerja birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien dan produktif serta professional.
Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS.	Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kabupaten Kapuas Hulu khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
	Penanganan PMKS belum sinergi antara Pemerintah, Swasta (dunia usaha) dan Masyarakat.

	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum valid.
	Pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti belum maksimal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai standar pelayanan minimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur.
	Belum terbentuknya UPT PPA disebabkan belum tersedianya tenaga profesional seperti Pekerja Sosial (Peksos) dan Psikolog sehingga belum optimalnya Penjangkauan/penemuan, asesmen, pembahasan dan intervensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	Kurangnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
	Belum optimalnya upaya mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Pengarus Utamaan Gender/PUG).
	Belum terpenuhinya data secara optimal terkait PPRG dan ARG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender-

	Anggaran Responsif Gender) untuk mendukung APE (Anugerah Parahita Ekapraya) sebagai komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender.
	Belum semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak.
Opportunities Factors (Peluang)	Threats Factors (Ancaman)
	Belum semua Kecamatan membentuk Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat Kecamatan dalam rangka wadah bagi anak-anak untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja;	Masih Tingginya angka Kemiskinan, Pengangguran, dan Kesenjangan ekonomi dapat meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Keterlibatan Pimpinan dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan.	Masih Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan juga menjadi ancaman. Bencana alam, perubahan iklim, dan masalah lingkungan lainnya dapat menimbulkan masalah sosial baru yang memerlukan perhatian dan penanganan.
Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang pelayanan masyarakat.	Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program-program urusan sosial maupun Pemberdayaan Perempuan dan

	Perlindungan Anak yang dapat menghambat efektivitas program sehingga belum efektifnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan.
Koordinasi yang baik antar Instansi, dengan terjadinya Koordinasi yang baik antara Dinas/Badan dan instansi vertikal (Pengadilan Negeri Putussibau, Polres Kapuas Hulu, BPJS Cabang Sintang) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, anak, dan lansia, serta rendahnya pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender.

2.2.5 Penentuan Isu Startegis

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan kualitas hidup anak merupakan suatu upaya untuk mengurangi dampak kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang memenuhi hak-hak dasar dari berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupannya tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi sejahtera sosial, kesetaraan geder dan perlindungan bagi Anak dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendorong budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang lebih partisipatif dan inklusif, serta sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku
2. Mendorong terbentuknya UPT PPA di Kabupaten Kapuas Hulu agar layanan yang komprehensif dan terpadu bagi korban kekerasan, termasuk layanan kesehatan, hukum, dan psikologis

3. Optimalisasi data dan informasi yang akurat mengenai isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk mendukung penyusunan kebijakan dan program yang efektif.
4. Optimalisasi penanganan kemiskinan dengan penguatan data tepat sasaran

Tabel 2.5

Isu Strategis

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASLAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerima Manfaat	- Masih lemahnya Data Base PPKS bynameby address di Kabupaten Kapuas hulu - Belum tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial					Optimalisasi penanganan kemiskinan dengan penguatan data tepat sasaran
Adanya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan dan instansi vertikal (Pengadilan Negeri Putussibau, Polres Kapuas Hulu, BPJS Cabang Sintang) di	Belum terbentuknya UPT PPA disebabkan belum tersedianya tenaga profesional seperti Pekerja Sosial (Peksos) dan Psikolog sehingga belum optimalnya			Perlindungan anak dari eksploitasi dan perdagangan	Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.	Mendorong terbentuknya UPT PPA di Kabupaten Kapuas Hulu agar layanan yang komprehensif dan terpadu bagi korban kekerasan, termasuk

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak maupun PMKS	Penjangkauan/ penemuan kasus, asesmen, pembahasan dan intervensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.					layanan kesehatan, hukum, dan psikologis
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Kapuas Hulu sedikit menurun dari 0,522 (tahun 2022) menjadi 0,398 (tahun 2024)	Belum terpenuhinya Pengumpulan Data terkait PPRG dan ARG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender-Anggaran Responsif Gender) untuk mendukung APE (Anugerah Parahita Ekapraya) sebagai		Kesenjangan Gender	Pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan.	Peningkatan kualitas keluarga dan Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Optimalisasi data dan informasi yang akurat mengenai isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk mendukung penyusunan kebijakan dan program yang efektif.

	komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender.					
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan secara Akuntabel pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Penilaian LHE Sakip dari CC (tahun 2021) menjadi BB (tahun 2024).	Pemenuhan Kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten dalam menerapkan SAKIP.	Transformasi Integrasi SAKIP dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran.	SAKIP dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuntut adanya adaptasi SAKIP dalam Pengembangan dan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung sistem kerja baru berbasis digital	Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan SAKIP dalam penyusunan perencanaan.	Mendorong budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang lebih partisipatif dan inklusif, serta sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku

BAB III

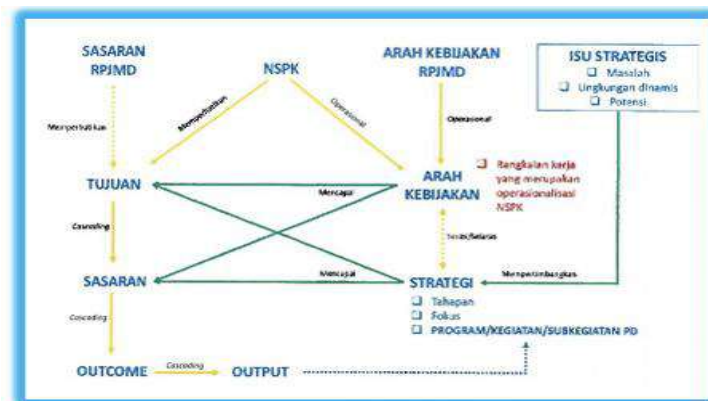
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra 2025-2029 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Renstra yang efektif memerlukan pendekatan yang sistematis, partisipasi luas, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengikuti konsep renstra dibawah ini, pemerintah daerah dapat menyusun Renstra yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga relevan dan implementatif.

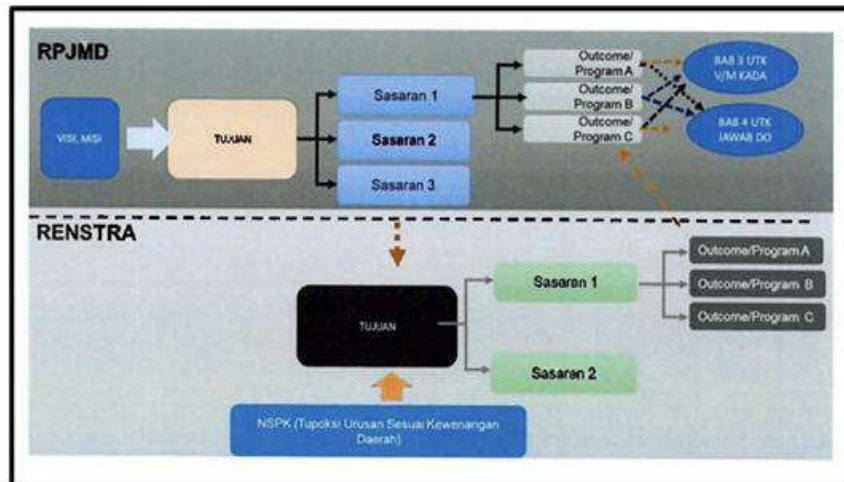
Gambar 3.1

Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu)



Tujuan dan Sasaran Renstra merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sasaran dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjadi tujuan dan dasar dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis). Tujuan Renstra merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih maka, Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan Perangkat Daerah yang mengampu 2 (dua) urusan sehingga memiliki tujuan lebih dari 1 (satu) sebagai berikut:

1. Menurunkan Angka Kemiskinan
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan RENSTRA Tahun 2025-2029

VISI KEPALA DAERAH : Terwujudnya Kapuas Hulu “SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil).									
MISI KEPALA DAERAH		TUJUAN DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA			
<u>Misi 2</u>	Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan	<u>Tujuan 1</u>	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	<u>Sasaran 1</u>	Menurunnya Angka Kemiskinan	<u>Tujuan 1</u>	Menurunkan Angka Kemiskinan	<u>Sasaran 1</u>	Meningkatnya kesejahteraan sosial
<u>Misi 3</u>	Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan	<u>Tujuan 2</u>	Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang sehat, terdidik, terampil, berdaya saing dan setara secara gender	<u>Sasaran 2</u>	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>Tujuan 2</u>	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>Sasaran 2</u>	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
<u>Misi 4</u>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas	<u>Tujuan 3</u>	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang berdampak	<u>Sasaran 3</u>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah	<u>Tujuan 3</u>	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	<u>Sasaran 3</u>	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

				Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
			<u>Sasaran 4</u> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	<u>Tujuan 4</u> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	<u>Sasaran 4</u> Meningkatkan Standar Kepatuhan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.2
Tujuan Renstra 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan Renstra
Sasaran 1		Tujuan 1	
Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
Sasaran 2		Tujuan 2	
Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sasaran 3		Tujuan 3	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP
Sasaran 4		Tujuan 4	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		

3.2 Sasaran Renstra 2025-2029 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu : Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasari pada faktor faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Meningkatnya Standar Kepatuhan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari sasaran Renstra di atas, dapat dilihat indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Renstra 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Sasaran Renstra
		<u>Indikator Kinerja Sasaran 1</u>
<u>Sasaran 1</u>	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani
		<u>Indikator Kinerja Sasaran 2.1</u>
<u>Sasaran 2</u>	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi/Lembaga
		<u>Indikator Kinerja Sasaran 2.2</u> Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terlayani

		<u>Indikator Kinerja Sasaran 3</u>
<u>Sasaran 3</u>	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP
		<u>Indikator Kinerja Sasaran 4</u>
<u>Sasaran 4</u>	Meningkatnya Standar Kepatuhan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dari tujuan dan sasaran Renstra di atas, Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.4 penentuan target tujuan dan sasaran renstra untuk lima tahun kedepannya.

Tabel 3.4
Target Tujuan Dan Sasaran Renstra 2025-2029
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Sasaran RPJMD</u> 1. Menurunkan Angka kemiskinan	<u>Tujuan 1.</u> Menurunkan Angka kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Persentase	7.4	7.4	7.2	7	6.8	6.5	6.2
		<u>Sasaran 1.</u> Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani	Persentase	85	85	86	87	88	89	90
<u>Sasaran RPJMD</u> 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perlindungan anak	<u>Tujuan 2.</u> Meningkatkan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perlindungan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,76	63,96	64,16	64,36	64,56	64,76	63,77
		<u>Sasaran 2.</u> Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi / Lembaga	Persentase	0	53,76	54,26	54,76	55,26	55,76	56,26
			Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terlayani	Persentase	47.06	100	100	100	100	100	100

<u>Sasaran RPJMD</u> 3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah	<u>Tujuan 3.</u> Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP	Nilai	67.24	68	69	70	71	72	73
		<u>Sasaran 3.</u> Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP	Nilai	73.25	73.50	73.75	74.0	74.25	74.50	74.75
<u>Sasaran RPJMD</u> 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	<u>Tujuan 4.</u> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3.08	3.18	3.28	3.38	3.48	3.58	3.68
			Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82.74	82.9	83.4	83.9	84.4	84.9	85.29
		<u>Sasaran 4.</u> Meningkatnya Standar Kepatuhan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>Indikator Kinerja 5.</u> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,15	80.20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45

3.3 Strategi Renstra 2025-2029 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial;
2. Meningkatkan Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial;
4. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Meningkatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana;
6. Meningkatkan Tata Kelola Taman Makam Pahlawan;
7. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
8. Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan;
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif;
11. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak; dan
12. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel.
13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

3.4 Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah

ditetapkan. Berikut ini Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 :

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
5. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
6. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
7. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
9. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
10. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
11. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
14. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
17. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;

18. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
19. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
20. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
21. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
22. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
23. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
24. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
25. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
26. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
27. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
28. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
Pada Renstra Tahun 2025-2029
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

VISI		Terwujudnya Kapuas Hulu "SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)					
MISI 2		Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1.	Menurunkan Angka kemiskinan	Sasaran 1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Strategi 1.1.1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1.1.1.1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
						1.1.1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Strategi 1.1.2	Meningkatnya Layanan	1.1.2.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban

					Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
				Strategi 1.1.3	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.1.3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
						1.1.3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
				Strategi 1.1.4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1.4.1	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar
						1.1.4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Strategi 1.1.5	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1.1.5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
						1.1.5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
				Strategi 1.1.6	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	1.1.6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

MISI 3		: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sasaran 2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Strategi 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.1.1.1	Terciptanya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
						2.1.1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Strategi 2.1.2	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	2.1.2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						2.1.2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
						2.1.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Strategi 2.1.3	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender,	2.1.3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak

					Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak		Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Strategi 2.1.4	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	2.1.4.1	Terciptanya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
						2.1.4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Strategi 2.1.5	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	2.1.5.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						2.1.5.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						2.1.5.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

MISI 4		: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
3.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah	Sasaran 3	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Strategi 3.1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel	3.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sasaran 4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Strategi 4.1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel	3.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						3.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						3.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						3.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						3.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						3.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

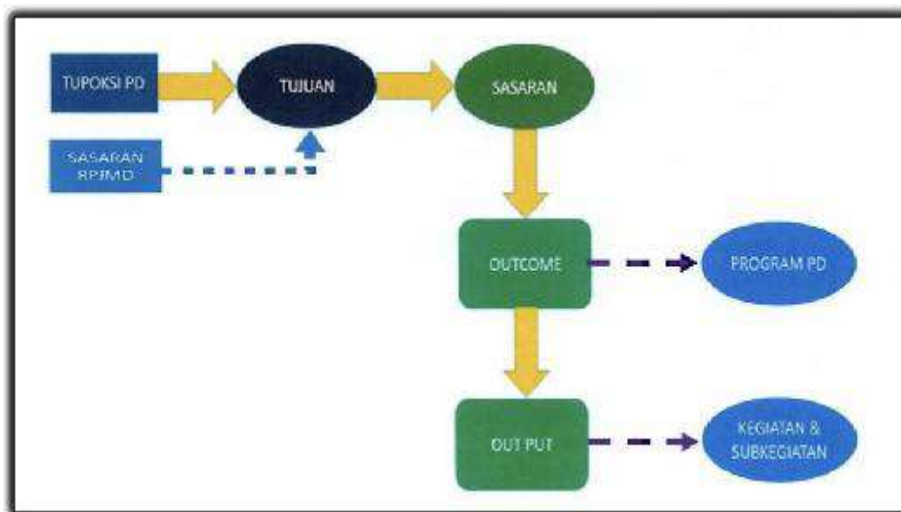
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kapuas Hulu melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dapat dilihat kerangka pada gambar berikut.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Dari Gambar 4.1 diatas, selanjutnya disajikan pada tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra 2025-2029 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Renstra Tahun 2025-2029
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
	Menurunya Angka kemiskinan				Tingkat Kemiskinan ((%))		
		Meningkatkan kesejahteraan sosial			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani (%)		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
					Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Jumlah Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri Yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan		
				Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase (%) lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					Persentase (%) anak terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
					Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan		
					Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaannya	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		
				Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0005 - Fasilitas Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terkelola Dengan Baik	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)		
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Persentase Partisipasi perempuan Dalam Organisasi/Lembaga Pemerintahan (%)		
					Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terlayani (%)		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terciptanya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				)	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terciptanya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah				Predikat SAKIP (Predikat)		
		Meningkatkan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel		Predikat SAKIP	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.06.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

4.2 Uraian Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Program Perangkat Daerah Adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun Program-Program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Bencana;
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
8. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
9. Program Perlindungan Perempuan;
10. Program Kualitas Keluarga;
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
12. Program Perlindungan Khusus Anak.

Dari Program- program yang akan dilaksanakan diatas kemudian dituangkan pada indikator program (outcome) yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Program Pada Renstra Tahun 2025-2029
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.354.089.727,00		4.789.498.699,00		5.268.448.570,00		5.795.293.426,00		6.374.822.769,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.500.737.337,00		3.850.811.070,00		4.235.892.178,00		4.659.481.395,00		5.125.429.535,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel	Nilai SAKIP (Angka)	73,25	73,50	73,75	3.500.737.337,00	74	3.850.811.070,00	71	4.235.892.178,00	72	4.659.481.395,00	73	5.125.429.535,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					244.977.700,00		269.475.470,00		296.423.017,00		326.065.318,00		358.671.851,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	50	0	10	244.977.700,00	10	269.475.470,00	10	296.423.017,00	10	326.065.318,00	10	358.671.851,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang MeningkatKualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	55	0	11		11		11		11		11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					4.496.800,00		4.946.480,00		5.441.128,00		5.985.241,00		6.583.765,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	4.496.800,00	100	4.946.480,00	100	5.441.128,00	100	5.985.241,00	100	6.583.765,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Jumlah Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri Yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Nilai)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					397.996.720,00		437.796.392,00		481.576.031,00		529.733.634,00		582.706.998,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlarang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	397.996.720,00	100	437.796.392,00	100	481.576.031,00	100	529.733.634,00	100	582.706.998,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) anak terlarang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase (%) lanjut usia terlarang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	50	15	7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					76.556.920,00		84.212.612,00		92.633.873,00		101.897.261,00		112.086.986,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100	76.556.920,00	100	84.212.612,00	100	92.633.873,00	100	101.897.261,00	100	112.086.986,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	1.4	19.5		19.5		19.5		20.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan (%)	24.6	4.1	4.1		4.1		4.1		4.1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					97.411.050,00		107.152.155,00		117.867.371,00		129.654.108,00		142.619.518,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	97.411.050,00	100	107.152.155,00	100	117.867.371,00	100	129.654.108,00	100	142.619.518,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	60	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					31.913.200,00		35.104.520,00		38.614.972,00		42.476.469,00		46.724.116,00	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terkelola Dengan Baik (%)	100	100	100	31.913.200,00	100	35.104.520,00	100	38.614.972,00	100	42.476.469,00	100	46.724.116,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA					417.021.715,00		458.723.887,00		504.596.277,00		555.055.903,00		610.561.493,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					46.450.250,00		51.095.275,00		56.204.803,00		61.825.283,00		68.007.811,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	91.69	90	95	46.450.250,00	95	51.095.275,00	95	56.204.803,00	95	61.825.283,00	95	68.007.811,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					196.527.265,00		216.179.992,00		237.797.991,00		261.577.790,00		287.735.569,00	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	80	80.5	80.7	196.527.265,00	90	216.179.992,00	90.3	237.797.991,00	90.5	261.577.790,00	90.8	287.735.569,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		1.610.510,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	100	100	1.100.000,00	100	1.210.000,00	100	1.331.000,00	100	1.464.100,00	100	1.610.510,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					122.815.550,00		135.097.105,00		148.606.816,00		163.467.497,00		179.814.247,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	100	100	100	122.815.550,00	100	135.097.105,00	100	148.606.816,00	100	163.467.497,00	100	179.814.247,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					50.128.650,00		55.141.515,00		60.655.667,00		66.721.233,00		73.393.356,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	50	60	65	50.128.650,00	70	55.141.515,00	75	60.655.667,00	80	66.721.233,00	85	73.393.356,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
TOTAL KESELURUHAN					4.771.111.442,00		5.248.222.586,00		5.773.044.847,00		6.350.349.329,00		6.985.384.262,00	

4.3 Uraian Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yg berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Kegiatan pada Program yang sudah diuraikan sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 9. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Program Pemberdayaan Sosial
 1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
 3. Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
4. Program Rehabilitasi Sosial
 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 5. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 6. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 7. Pemberian Layanan Rujukan
 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 1. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

2. Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 2. Rujukan Anak-Anak Terlantar
 3. Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penanganan Bencana
 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 3. Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
 4. Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
 5. Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
 6. Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
 7. Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)

8. Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
8. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan
 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan 89erempu penyedia layanan pemberdayaan 89erempuan kewenangan Kabupaten/Kota
9. Program Perlindungan Perempuan
 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 2. Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Program Kualitas Keluarga
 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Program Perlindungan Khusus Anak
 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
 2. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 2. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
 2. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.4 Uraian Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Subkegiatan perangkat daerah adalah bagian yang lebih rinci atau lebih spesifik dari suatu kegiatan perangkat daerah. Subkegiatan merupakan langkah-langkah atau aktivitas yang lebih detail yang mendukung pelaksanaan kegiatan utama dalam rangka mencapai tujuan program. Fungsi Urusan Subkegiatan dalam Pembangunan Daerah yaitu:

1. Mendukung Program Prioritas Subkegiatan diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Program prioritas ini biasanya mengacu pada kebutuhan dan potensi daerah serta arah kebijakan nasional.
2. Implementasi Kebijakan Melalui subkegiatan, kebijakan dan program pembangunan dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur, sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
3. Pengelolaan Anggaran Subkegiatan membantu dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih rinci sehingga alokasi dana bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan program prioritas.

4. Monitoring dan Evaluasi Dengan adanya subkegiatan, pelaksanaan program dapat dipantau secara detail dan hasilnya dapat dievaluasi untuk perbaikan di masa depan.

Dari fungsi tersebut subkegiatan sebagai pedoman operasional dapat dilihat pada Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disertai dengan kinerja, indikator kinerja dan target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu (Lampiran 1). Selanjutnya Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, maka ditentukan subkegiatan prioritas seperti pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	

3	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
4	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
5	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
			1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
			1.06.06.2.02.0005 - Fasilitas Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
			1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
			1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
			1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	

6	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
7	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
8	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
9	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

			2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
10	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
11	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

			1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			1.06.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2025-2029 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Tahun 2025-2029
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		<u>Sasaran 1.</u> Meningkatnya kesejahteraan sosial	<u>Indikator Kinerja 1.</u> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani	Persentase	85	85	86	87	88	89	90
		<u>Sasaran 2.</u> Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<u>Indikator Kinerja 2.</u> Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi / Lembaga	Persentase	0	53,76	54,26	54,76	55,26	55,76	56,26
			<u>Indikator Kinerja 3.</u> Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terlayani	Persentase	47,06	100	100	100	100	100	100
		<u>Sasaran 3.</u> Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>Indikator Kinerja 4.</u> Nilai SAKIP	Nilai	73.25	73.50	73.75	74.0	74.25	74.50	74.75

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		<u>Sasaran 4.</u> Meningkatnya Standar Kepatuhan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>Indikator Kinerja 5.</u> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,15	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45

Tabel 4.6
Formulasi Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Sasaran 1</u>	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	<u>IK 1</u> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah Penerima Bantuan Sosial pada Desil 1-5 dalam DTSEN}}{\text{Jumlah Penduduk yang berada di Desil 1-5 pada DTSEN}} \times 100\%$	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos
<u>Sasaran 2</u>	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>IK 2</u> Persentase keterlibatan perempuan dalam organisasi / lembaga <u>IK 3</u> Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah perempuan dalam organisasi / lembaga}}{\text{Jumlah keseluruhan anggota dalam organisasi / lembaga}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terlayani}}{\text{Jumlah Total Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak}} \times 100\%$	Data ASN, Anggota Legislatif, BUMD, BUMN, Koperasi, Lembaga pemerintah pusat yang berada di daerah Kepolisian Resort Kapuas Hulu

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Sasaran 3</u>	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>IK 4</u> Nilai SAKIP	<i>Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP</i>	Penilaian Reviu Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
<u>Sasaran 4</u>	Meningkatnya Standar Kepatuhan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>IK 5</u> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<i>Survey Kepuasan Masyarakat merupakan Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memenuhi 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dilakukan secara berkala.</i>	Pengolahan Data kuisiner Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala (semester)

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran spesifik yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah, yang langsung terkait dengan pencapaian target-target kinerja utama. IKK adalah alat ukur penting untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Target kinerja harus jelas, realistis, dan terukur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah. Melalui IKK, pemerintah daerah dapat fokus pada prioritas utama dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Berdasarkan uraian hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah (RPJMD) dengan Perangkat Daerah (Renstra) diatas, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.7
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1.	Tingkat Kemiskinan	%	7,40	7,40	7,20	7,00	6,80	6,50	6,20
2.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,52	86,69	86,89	87,09	87,29	87,49	87,69
3.	Indeks Indeks Pemberdayaan Gender Indeks	Indeks	63,76	63,96	64,16	64,36	64,56	64,76	64,96

4.	Indeks Ketimpangan Gender Indeks	Indeks	0,498*	0,456	0,435	0,413	0,392	0,371	0,350
Aspek Pelayanan Umum									
1.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Indeks	3,08	3,18	3,28	3,38	3,48	3,58	3,68
2.	Predikat SAKIP Kabupaten	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks	82,74	82,90	83,40	83,90	84,40	84,90	85,29

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan dalam periode tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025 – 2029. Rencana strategis diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu empat tahun (2025 – 2029).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Putussibau, 31 Oktober 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu



MARTHA BANANG, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP: 19651123 199203 2 006

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

RENSTRA 2025-2029

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.354.089.727,00		4.789.498.699,00		5.268.448.570,00		5.795.293.426,00		6.374.822.769,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.500.737.337,00		3.850.811.070,00		4.235.892.178,00		4.659.481.395,00		5.125.429.535,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel	Predikat SAKIP (Angka)	61,40	66	3.500.737.337,00	69	3.850.811.070,00	71	4.235.892.178,00	72	4.659.481.395,00	73	5.125.429.535,00	1.06.2.08.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PFRI INDIINGAN	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.442.000,00		23.586.200,00		25.944.820,00		28.539.302,00		31.393.233,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	21.442.000,00	1	23.586.200,00	1	25.944.820,00	1	28.539.302,00	1	31.393.233,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	12	3.000.000,00	12	3.300.000,00	12	3.630.000,00	12	3.993.000,00	12	4.392.300,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.630.000,00	1	3.993.000,00	1	4.392.300,00		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.958.000,00		2.153.800,00		2.369.180,00		2.606.098,00		2.866.708,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	1	1.958.000,00	1	2.153.800,00	1	2.369.180,00	1	2.606.098,00	1	2.866.708,00		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.958.000,00		2.153.800,00		2.369.180,00		2.606.098,00		2.866.708,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.958.000,00	1	2.153.800,00	1	2.369.180,00	1	2.606.098,00	1	2.866.708,00		
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-				1.958.000,00		2.153.800,00		2.369.180,00		2.606.098,00		2.866.708,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	1.958.000,00	1	2.153.800,00	1	2.369.180,00	1	2.606.098,00	1	2.866.708,00		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00		2.928.200,00		3.221.020,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	2.200.000,00	1	2.420.000,00	1	2.662.000,00	1	2.928.200,00	1	3.221.020,00		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.368.000,00		5.904.800,00		6.495.280,00		7.144.808,00		7.859.289,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	5.368.000,00	4	5.904.800,00	4	6.495.280,00	4	7.144.808,00	4	7.859.289,00		
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral				1.000.000,00		1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.210.000,00	1	1.331.000,00	1	1.464.100,00		
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.210.000,00	2	1.331.000,00	2	1.464.100,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.151.267,00		3.300.166.393,00		3.630.183.033,00		3.993.201.335,00		4.392.521.469,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.000.151.267,00	1	3.300.166.393,00	1	3.630.183.033,00	1	3.993.201.335,00	1	4.392.521.469,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN								
			2026		2027		2028		2029		2030											
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU										
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	32		32		32		32		32											
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	12		12		12		12		12											
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	1		1		1		1		1											
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		1		1		1		1											
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1											
	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.780.676.567,00				3.058.744.223,00					3.364.618.646,00		3.701.080.510,00		4.071.188.561,00		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		32		2.780.676.567,00		32		3.058.744.223,00				32	3.364.618.646,00	32	3.701.080.510,00	32	4.071.188.561,00		
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas				28.116.000,00		30.927.600,00		34.020.360,00		37.422.396,00		41.164.636,00										
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	28.116.000,00	1	30.927.600,00	1	34.020.360,00	1	37.422.396,00	1	41.164.636,00										
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				177.379.400,00		195.117.340,00		214.629.074,00		236.091.981,00		259.701.179,00										
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	1	177.379.400,00	1	195.117.340,00	1	214.629.074,00	1	236.091.981,00	1	259.701.179,00										
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00										
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.630.000,00	1	3.993.000,00	1	4.392.300,00										
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00										
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00										
1.06.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00		3.660.250,00										
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.750.000,00	1	3.025.000,00	1	3.327.500,00	1	3.660.250,00										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	12	3.479.300,00	12	3.827.230,00	12	4.209.953,00	12	4.630.948,00	12	5.094.043,00		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat				440.000,00		484.000,00		532.400,00		585.640,00		644.204,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	0	1	440.000,00	1	484.000,00	1	532.400,00	1	585.640,00	1	644.204,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				220.000,00		242.000,00		266.200,00		292.820,00		322.102,00		
Tersediannya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	220.000,00	1	242.000,00	1	266.200,00	1	292.820,00	1	322.102,00		
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				220.000,00		242.000,00		266.200,00		292.820,00		322.102,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	0	1	220.000,00	1	242.000,00	1	266.200,00	1	292.820,00	1	322.102,00		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				79.205.300,00		103.230.930,00		113.554.023,00		124.909.425,00		137.400.368,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	79.205.300,00	1	103.230.930,00	1	113.554.023,00	1	124.909.425,00	1	137.400.368,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2	2		2		2		2		2			
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut				64.000.000,00		86.505.100,00		95.155.610,00		104.671.171,00		115.138.288,00		
Tersediannya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	64.000.000,00	1	86.505.100,00	1	95.155.610,00	1	104.671.171,00	1	115.138.288,00		
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.205.300,00		16.725.830,00		18.398.413,00		20.238.254,00		22.262.080,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2	2	15.205.300,00	2	16.725.830,00	2	18.398.413,00	2	20.238.254,00	2	22.262.080,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				299.380.460,00		313.213.406,00		344.534.747,00		378.988.222,00		416.887.044,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	299.380.460,00	1	313.213.406,00	1	344.534.747,00	1	378.988.222,00	1	416.887.044,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1	2.032.800,00	1	2.236.080,00	1	2.459.688,00	1	2.705.657,00	1	2.976.222,00		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1	29.282.000,00		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.398.700,00		7.038.570,00		7.742.427,00		8.516.670,00		9.368.337,00			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	6.398.700,00	1	7.038.570,00	1	7.742.427,00	1	8.516.670,00	1	9.368.337,00		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.120.000,00		11.132.000,00		12.245.200,00		13.469.720,00		14.816.692,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.120.000,00	1	11.132.000,00	1	12.245.200,00	1	13.469.720,00	1	14.816.692,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			26.353.250,00		28.988.575,00		31.887.433,00		35.076.176,00		38.583.793,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	26.353.250,00	1	28.988.575,00	1	31.887.433,00	1	35.076.176,00	1	38.583.793,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			215.004.710,00		220.400.081,00		242.440.089,00		266.684.098,00		293.352.509,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	215.004.710,00	12	220.400.081,00	12	242.440.089,00	12	266.684.098,00	12	293.352.509,00		
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			9.471.000,00		10.418.100,00		11.459.910,00		12.605.901,00		13.866.491,00			
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	9.471.000,00	1	10.418.100,00	1	11.459.910,00	1	12.605.901,00	1	13.866.491,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			80.446.354,00		88.490.990,00		97.340.089,00		107.074.098,00		117.781.507,00			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	80.446.354,00	1	88.490.990,00	1	97.340.089,00	1	107.074.098,00	1	117.781.507,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.170.000,00		5.687.000,00		6.255.700,00		6.881.270,00		7.569.397,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.170.000,00	12	5.687.000,00	12	6.255.700,00	12	6.881.270,00	12	7.569.397,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				71.025.354,00		78.127.890,00		85.940.679,00		94.534.747,00		103.988.221,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	71.025.354,00	12	78.127.890,00	12	85.940.679,00	12	94.534.747,00	12	103.988.221,00		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				3.751.000,00		4.126.100,00		4.538.710,00		4.992.581,00		5.491.839,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2	2	3.751.000,00	2	4.126.100,00	2	4.538.710,00	2	4.992.581,00	2	5.491.839,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.000,00		550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	500.000,00	1	550.000,00	1	605.000,00	1	665.500,00	1	732.050,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.671.956,00		21.639.151,00		23.803.066,00		26.183.373,00		28.801.710,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	19.671.956,00	1	21.639.151,00	1	23.803.066,00	1	26.183.373,00	1	28.801.710,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknva (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau				11.686.400,00		12.855.040,00		14.140.544,00		15.554.598,00		17.110.058,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknva (Unit)	1	1	11.686.400,00	1	12.855.040,00	1	14.140.544,00	1	15.554.598,00	1	17.110.058,00		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				7.985.556,00		8.784.111,00		9.662.522,00		10.628.775,00		11.691.652,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	7.985.556,00	1	8.784.111,00	1	9.662.522,00	1	10.628.775,00	1	11.691.652,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				244.977.700,00		269.475.470,00		296.423.017,00		326.065.318,00		358.671.851,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	50	10	244.977.700,00	10	269.475.470,00	10	296.423.017,00	10	326.065.318,00	10	358.671.851,00	1.06.2.06.0.00.01.000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	55	11		11		11		11		11			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah				11.289.300,00		12.418.230,00		13.660.053,00		15.026.058,00		16.528.664,00		
Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau	0	2	11.289.300,00	2	12.418.230,00	2	13.660.053,00	2	15.026.058,00	2	16.528.664,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				11.289.300,00		12.418.230,00		13.660.053,00		15.026.058,00		16.528.664,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau	0	2	11.289.300,00	2	12.418.230,00	2	13.660.053,00	2	15.026.058,00	2	16.528.664,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				233.688.400,00		257.057.240,00		282.762.964,00		311.039.260,00		342.143.187,00		
Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan	0	25	233.688.400,00	25	257.057.240,00	25	282.762.964,00	25	311.039.260,00	25	342.143.187,00		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan	0	2		2		2		2		2			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				196.990.200,00		216.689.220,00		238.358.142,00		262.193.956,00		288.413.352,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2	196.990.200,00	2	216.689.220,00	2	238.358.142,00	2	262.193.956,00	2	288.413.352,00		
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	0	100	550.000,00	100	605.000,00	100	665.500,00	100	732.050,00	100	805.255,00		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan	0	2	550.000,00	2	605.000,00	2	665.500,00	2	732.050,00	2	805.255,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				35.598.200,00		39.158.020,00		43.073.822,00		47.381.204,00		52.119.325,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat	0	25	35.598.200,00	25	39.158.020,00	25	43.073.822,00	25	47.381.204,00	25	52.119.325,00		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK				4.496.800,00		4.946.480,00		5.441.128,00		5.985.241,00		6.583.765,00		
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	4.496.800,00	100	4.946.480,00	100	5.441.128,00	100	5.985.241,00	100	6.583.765,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PFRI INDIINGAN	
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang mendapat Pelayanan	2	2				2		2		2			
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan				4.496.800,00		4.946.480,00		5.441.128,00		5.985.241,00		6.583.765,00		
Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	2	4.496.800,00	2	4.946.480,00	2	5.441.128,00	2	5.985.241,00	2	6.583.765,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan				4.496.800,00		4.946.480,00		5.441.128,00		5.985.241,00		6.583.765,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	2	4.496.800,00	2	4.946.480,00	2	5.441.128,00	2	5.985.241,00	2	6.583.765,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				397.996.720,00		437.796.392,00		481.576.031,00		529.733.634,00		582.706.998,00		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	397.996.720,00	100	437.796.392,00	100	481.576.031,00	100	529.733.634,00	100	582.706.998,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PFR I NDI I NGAN	
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100		100		100		100		100			
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	50	7		7		7		7		7			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				396.896.720,00		436.586.392,00		480.245.032,00		528.269.535,00		581.096.488,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	15	396.896.720,00	15	436.586.392,00	15	480.245.032,00	15	528.269.535,00	15	581.096.488,00		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	120		110		110		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	0	170		180		185		185		190			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30		30		35		40		40			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				36.577.200,00		40.234.920,00		44.258.412,00		48.684.253,00		53.552.679,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	0	170	36.577.200,00	180	40.234.920,00	185	44.258.412,00	185	48.684.253,00	190	53.552.679,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				39.924.500,00		43.916.950,00		48.308.645,00		53.139.510,00		58.453.460,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	39.924.500,00	30	43.916.950,00	35	48.308.645,00	40	53.139.510,00	40	58.453.460,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				226.174.300,00		248.791.730,00		273.670.903,00		301.037.993,00		331.141.793,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	0	120	226.174.300,00	110	248.791.730,00	110	273.670.903,00	100	301.037.993,00	100	331.141.793,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.747.500,00		6.322.250,00		6.954.475,00		7.649.923,00		8.414.915,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6	5.747.500,00	5	6.322.250,00	5	6.954.475,00	5	7.649.923,00	5	8.414.915,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				3.921.060,00		4.313.166,00		4.744.483,00		5.218.931,00		5.740.824,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	15	3.921.060,00	15	4.313.166,00	15	4.744.483,00	15	5.218.931,00	15	5.740.824,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				4.922.500,00		5.414.750,00		5.956.225,00		6.551.848,00		7.207.032,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6	4.922.500,00	5	5.414.750,00	5	5.956.225,00	5	6.551.848,00	5	7.207.032,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				79.629.660,00		87.592.626,00		96.351.889,00		105.987.077,00		116.585.785,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	79.629.660,00	5	87.592.626,00	5	96.351.889,00	5	105.987.077,00	5	116.585.785,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				1.100.000,00		1.210.000,00		1.330.999,00		1.464.099,00		1.610.510,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	0	2	1.100.000,00	3	1.210.000,00	2	1.330.999,00	3	1.464.099,00	2	1.610.510,00		
	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	0	30		30		30		30		30			
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	0	2	550.000,00	3	605.000,00	2	665.500,00	3	732.050,00	2	805.255,00		
1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				550.000,00		605.000,00		665.499,00		732.049,00		805.255,00		
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)	0	30	550.000,00	30	605.000,00	30	665.499,00	30	732.049,00	30	805.255,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN				76.556.920,00		84.212.612,00		92.633.873,00		101.897.261,00		112.086.986,00		
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	76.556.920,00	100	84.212.612,00	100	92.633.873,00	100	101.897.261,00	100	112.086.986,00	1.06.2.08.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir	100	19,5		19,5		19,5		19,5		20,6			
	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan	24,6	4,1		4,1		4,1		4,1		4,1			
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar				1.650.000,00		1.815.000,00		1.996.500,00		2.196.150,00		2.415.765,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	0	25	1.650.000,00	25	1.815.000,00	25	1.996.500,00	25	2.196.150,00	20	2.415.765,00		
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2				2				2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	550.000,00	2	605.000,00	2	665.500,00	2	732.050,00	2	805.255,00		
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2	550.000,00	2	605.000,00	2	665.500,00	2	732.050,00	2	805.255,00		
1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	0	25	550.000,00	25	605.000,00	25	665.500,00	25	732.050,00	20	805.255,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah				74.906.920,00		82.397.612,00		90.637.373,00		99.701.111,00		109.671.221,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang	0	38,300	74.906.920,00	38,000	82.397.612,00	37,700	90.637.373,00	37,400	99.701.111,00	37,100	109.671.221,00		
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0	25		25		25		25					
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	8.361		8.193		8.029		7.869		7.712			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah				12.798.500,00		14.078.350,00		15.486.185,00		17.034.804,00		18.738.284,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0	25	12.798.500,00	25	14.078.350,00	25	15.486.185,00	25	17.034.804,00	25	18.738.284,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan				43.929.820,00		48.322.802,00		53.155.082,00		58.470.590,00		64.317.649,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	8.361	43.929.820,00	8.193	48.322.802,00	8.029	53.155.082,00	7.869	58.470.590,00	7.712	64.317.649,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				18.178.600,00		19.996.460,00		21.996.106,00		24.195.717,00		26.615.288,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang	0	38,300	18.178.600,00	38,000	19.996.460,00	37,700	21.996.106,00	37,400	24.195.717,00	37,100	26.615.288,00		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				97.411.050,00		107.152.155,00		117.867.371,00		129.654.108,00		142.619.518,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	97.411.050,00	100	107.152.155,00	100	117.867.371,00	100	129.654.108,00	100	142.619.518,00	1.06.2.08.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERILINDINGAN			
	Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaannya	60	10		10		10		10		10					
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				35.863.850,00		39.450.235,00		43.395.259,00		47.734.784,00		52.508.263,00				
Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	35.863.850,00	30	39.450.235,00	30	43.395.259,00	30	47.734.784,00	30	52.508.263,00				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	0	30		30		30		30		30					
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				22.938.850,00		25.232.735,00		27.756.009,00		30.531.609,00		33.584.770,00				
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	22.938.850,00	30	25.232.735,00	30	27.756.009,00	30	30.531.609,00	30	33.584.770,00				
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				12.925.000,00		14.217.500,00		15.639.250,00		17.203.175,00		18.923.493,00				
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	0	30	12.925.000,00	30	14.217.500,00	30	15.639.250,00	30	17.203.175,00	30	18.923.493,00				
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana				61.547.200,00		67.701.920,00		74.472.112,00		81.919.324,00		90.111.255,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen)	0	1	61.547.200,00	1	67.701.920,00	1	74.472.112,00	1	81.919.324,00	1	90.111.255,00				
	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0	4		4		4		4		4					
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	0	2		2		2		2		2					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10		10		10		10					
	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	0	25		25		25		25					
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	1	550.000,00	1	605.000,00	1	665.500,00	1	732.050,00	1	805.255,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				57.697.200,00		63.466.920,00		69.813.612,00		76.794.973,00		84.474.471,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10	57.697.200,00	10	63.466.920,00	10	69.813.612,00	10	76.794.973,00	10	84.474.471,00		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	0	2	550.000,00	2	605.000,00	2	665.500,00	2	732.050,00	2	805.255,00		
1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)	0	2	550.000,00	2	605.000,00	2	665.500,00	2	732.050,00	2	805.255,00		
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0	4	550.000,00	4	605.000,00	4	665.500,00	4	732.050,00	4	805.255,00		
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	0	25	550.000,00	25	605.000,00	25	665.500,00	25	732.050,00	25	805.255,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.050,00		805.255,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen)	0	1	550.000,00	1	605.000,00	1	665.500,00	1	732.050,00	1	805.255,00		
1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana				550.000,00		605.000,00		665.500,00		732.051,00		805.254,00		
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana	0	30	550.000,00	30	605.000,00	30	665.500,00	30	732.051,00	30	805.254,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM				31.913.200,00		35.104.520,00		38.614.972,00		42.476.469,00		46.724.116,00		
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terkelola Dengan Baik (%)	100	100	31.913.200,00	100	35.104.520,00	100	38.614.972,00	100	42.476.469,00	100	46.724.116,00	1.06.2.08.0.00.01.000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				31.913.200,00		35.104.520,00		38.614.972,00		42.476.469,00		46.724.116,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	31.913.200,00	2	35.104.520,00	2	38.614.972,00	2	42.476.469,00	2	46.724.116,00		
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	2	2				2				2			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional				2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00		2.928.200,00		3.221.020,00		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2.200.000,00	2	2.420.000,00	2	2.662.000,00	2	2.928.200,00	2	3.221.020,00		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				29.713.200,00		32.684.520,00		35.952.972,00		39.548.269,00		43.503.096,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	2	2	29.713.200,00	2	32.684.520,00	2	35.952.972,00	2	39.548.269,00	2	43.503.096,00		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				417.021.715,00		458.723.887,00		504.596.277,00		555.055.903,00		610.561.493,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN				46.450.250,00		51.095.275,00		56.204.803,00		61.825.283,00		68.007.811,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	91,69	95	46.450.250,00	95	51.095.275,00	95	56.204.803,00	95	61.825.283,00	95	68.007.811,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERKAWINAN	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				27.200.000,00		29.920.000,00		32.912.000,00		36.203.200,00		39.823.520,00		
Terciptanya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		4	27.200.000,00	4	29.920.000,00	4	32.912.000,00	4	36.203.200,00	4	39.823.520,00		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)		24		24		24		24					
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di kabupaten/kota	0	1		1		1		1					
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	0	1		1		1		1					
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		1.610.510,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	0	1	1.100.000,00	1	1.210.000,00	1	1.331.000,00	1	1.464.100,00	1	1.610.510,00		
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		1.610.510,00		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di kabupaten/kota	0	1	1.100.000,00	1	1.210.000,00	1	1.331.000,00	1	1.464.100,00	1	1.610.510,00		
2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	13.310.000,00	4	14.641.000,00		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)		24	15.000.000,00	24	16.500.000,00	24	18.150.000,00	24	19.965.000,00	24	21.961.500,00		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan				19.250.250,00		21.175.275,00		23.292.803,00		25.622.083,00		28.184.291,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	19.250.250,00	1	21.175.275,00	1	23.292.803,00	1	25.622.083,00	1	28.184.291,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		24		24		24		24		24			
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				18.150.250,00		19.965.275,00		21.961.803,00		24.157.983,00		26.573.781,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		24	18.150.250,00	24	19.965.275,00	24	21.961.803,00	24	24.157.983,00	24	26.573.781,00		
2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan				1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		1.610.510,00		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	1.100.000,00	1	1.210.000,00	1	1.331.000,00	1	1.464.100,00	1	1.610.510,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				196.527.265,00		216.179.992,00		237.797.991,00		261.577.790,00		287.735.569,00		
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	80	80,7	196.527.265,00	90	216.179.992,00	90,3	237.797.991,00	90,5	261.577.790,00	90,8	287.735.569,00	1.06.2.08.0.00.01.000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				93.610.765,00		102.971.842,00		113.269.026,00		124.595.928,00		137.055.521,00		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	93.610.765,00	1	102.971.842,00	1	113.269.026,00	1	124.595.928,00	1	137.055.521,00		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	0	27		27		27		27					
	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	0	1		1		1		1					
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)		1		1		1		1					
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)		1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1	29.282.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1	29.282.000,00		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				26.110.765,00		28.721.842,00		31.594.026,00		34.753.428,00		38.228.771,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	0	27	26.110.765,00	27	28.721.842,00	27	31.594.026,00	27	34.753.428,00	27	38.228.771,00		
2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		40.262.750,00		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	0	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00	1	40.262.750,00		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi				42.000.000,00		46.200.000,00		50.820.000,00		55.902.000,00		61.492.200,00		
Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orano)	5	5	42.000.000,00	5	46.200.000,00	5	50.820.000,00	5	55.902.000,00	5	61.492.200,00		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orano)	5	5				5		5		5			
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		32.210.200,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orano)	5	5	22.000.000,00	5	24.200.000,00	5	26.620.000,00	5	29.282.000,00	5	32.210.200,00		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orano)	5	5	20.000.000,00	5	22.000.000,00	5	24.200.000,00	5	26.620.000,00	5	29.282.000,00		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60.916.500,00		67.008.150,00		73.708.965,00		81.079.862,00		89.187.848,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	27	50	60.916.500,00	50	67.008.150,00	50	73.708.965,00	50	81.079.862,00	50	89.187.848,00		
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah dan non		27		27		27		27		27			
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang		50		50		50		50		50			
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20.916.500,00		23.008.150,00		25.308.965,00		27.839.862,00		30.623.848,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non	27	27	20.916.500,00	27	23.008.150,00	27	25.308.965,00	27	27.839.862,00	27	30.623.848,00		
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)		50	20.000.000,00	50	22.000.000,00	50	24.200.000,00	50	26.620.000,00	50	29.282.000,00		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)		50	20.000.000,00	50	22.000.000,00	50	24.200.000,00	50	26.620.000,00	50	29.282.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS				1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		1.610.510,00		
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Pusaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Indeks)	0	100	1.100.000,00	100	1.210.000,00	100	1.331.000,00	100	1.464.100,00	100	1.610.510,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERILINDUNGAN	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah				1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		1.610.510,00		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20	1.100.000,00	20	1.210.000,00	20	1.331.000,00	20	1.464.100,00	20	1.610.510,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.01.0000 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang				1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		1.610.510,00		
Tenaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20	1.100.000,00	20	1.210.000,00	20	1.331.000,00	20	1.464.100,00	20	1.610.510,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA				0		0		0		0		0		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				0		0		0		0		0	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				122.815.550,00		135.097.105,00		148.606.816,00		163.467.497,00		179.814.247,00		
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	100	100	122.815.550,00	100	135.097.105,00	100	148.606.816,00	100	163.467.497,00	100	179.814.247,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				51.000.000,00		56.100.000,00		61.710.000,00		67.881.000,00		74.669.100,00		
Terciptanya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	0	1	51.000.000,00	1	56.100.000,00	1	61.710.000,00	1	67.881.000,00	1	74.669.100,00		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		27		27		27		27		27			
	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)		24		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0	27		27		27		27		27			
	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang		20		20		20		20		20			
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				21.815.550,00		23.997.105,00		26.396.816,00		29.036.497,00		31.940.147,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang		20	21.815.550,00	20	23.997.105,00	20	26.396.816,00	20	29.036.497,00	20	31.940.147,00		
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0	27	20.000.000,00	27	22.000.000,00	27	24.200.000,00	27	26.620.000,00	27	29.282.000,00		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan		1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan		27	15.000.000,00	27	16.500.000,00	27	18.150.000,00	27	19.965.000,00	27	21.961.500,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				50.128.650,00		55.141.515,00		60.655.667,00		66.721.233,00		73.393.356,00		
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	50	65	50.128.650,00	70	55.141.515,00	75	60.655.667,00	80	66.721.233,00	85	73.393.356,00	1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup				26.128.650,00		28.741.515,00		31.615.667,00		34.777.233,00		38.254.956,00		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkatKab/Kota (Kegiatan)		1	26.128.650,00	1	28.741.515,00	1	31.615.667,00	1	34.777.233,00	1	38.254.956,00		
	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				11.128.650,00		12.241.515,00		13.465.667,00		14.812.233,00		16.293.456,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkatKab/Kota (Kegiatan)		1	11.128.650,00	1	12.241.515,00	1	13.465.667,00	1	14.812.233,00	1	16.293.456,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat				12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		
Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		5	12.000.000,00	5	13.200.000,00	5	14.520.000,00	5	15.972.000,00	5	17.569.200,00		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		5		5		5		5		5			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		8.784.600,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		5	6.000.000,00	5	6.600.000,00	5	7.260.000,00	5	7.986.000,00	5	8.784.600,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat				6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		8.784.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		5	6.000.000,00	5	6.600.000,00	5	7.260.000,00	5	7.986.000,00	5	8.784.600,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi lembaga		24	12.000.000,00	24	13.200.000,00	24	14.520.000,00	24	15.972.000,00	24	17.569.200,00		
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)		1		1		1		1		1			
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		8.784.600,00		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)		1	6.000.000,00	1	6.600.000,00	1	7.260.000,00	1	7.986.000,00	1	8.784.600,00		
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		8.784.600,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi lembaga		24	6.000.000,00	24	6.600.000,00	24	7.260.000,00	24	7.986.000,00	24	8.784.600,00		